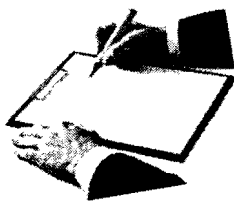


Dr. Ridwan, SH., MHum.



DISKRESI & TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH



DAFTAR ISI

Halaman Judul ~ i
Kata Pengantar ~ v
Daftar Isi ~ viii

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Fokus Kajian ~ 24
B. Konsepsi Teoretis ~ 24
C. Metode Penelitian ~ 43
1. Tipe Penelitian ~ 43
2. Pendekatan Penelitian ~ 45
3. Bahan Hukum ~ 46
4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum ~ 47

BAB 2 : DISKRESI, KEWENANGAN, DAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM

A. Negara Hukum ~ 49
1. Konsep Negara Hukum ~ 52
a. Rechtsstaat ~ 53
b. The Rule of Law ~ 55
c. Socialist Legality ~ 64

d. Nomokrasi Islam ~ 67
e. Negara Hukum Demokratis ~ 71
2. Negara Hukum Indonesia ~ 77
a. Dasar-dasar Konstitusional ~ 77
b. Unsur-unsur dan Karakteristik Negara Hukum Indonesia ~ 79
c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Indonesia ~ 85
B. Kewenangan dan Urusan Pemerintahan ~ 91
1. Pengertian dan Kedudukan Hukum Pemerintah ~ 91
2. Urusan Pemerintahan ~ 100
3. Pembagian Urusan Pemerintahan ~ 106
4. Kewenangan dan Sumber Kewenangan Pemerintah ~ 110
C. Diskresi Pemerintah dan Kewenangan Pembuatan Peraturan Kebijakan ~ 123
1. Pengertian Diskresi Pemerintah. ~ 123
2. Eksistensi dan Ruang Lingkup Diskresi Pemerintah ~ 129
3. Diskresi dan Peraturan Kebijakan ~ 142
4. Keabsahan Diskresi dan Peraturan Kebijakan ~ 150

BAB 3 : PRINSIP TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUG GUGAT JABATAN DAN PRIBADI DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

A. Dasar-dasar Pengujian Diskresi ~ 157
1. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah ~ 165
2. Penyalahgunaan Wewenang ~ 174
3. Tindakan Sewenang-wenang ~ 182
B. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah ~ 188
1. Prinsip Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pemerintah ~ 190
2. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Jabatan dalam Penggunaan Diskresi ~ 197
3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pribadi dalam Penggunaan Diskresi ~ 205
C. Perbandingan Tanggung Jawab Pemerintah ~ 213
1. Republik Rakyat Cina ~ 213
2. Belanda ~ 226

3. Perancis ~ 243
4. Inggris ~ 253
5. Indonesia ~ 264
- D. Diskresi dalam Berbagai Kasus ~ 276
 1. Buloggate ~ 277
 2. Dana Abadi Umat (DAU) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama ~ 287
 3. Bank Century ~ 297

BAB 4 : PENUTUP ~ 315

DAFTAR PUSTAKA ~ 321